

5Analisis Penerimaan Pajak Indonesia

Amalia Wijayanti^{1*} dan Firmansyah²

^{1,2} Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dari faktor-faktor makroekonomi, seperti Produk Domestik Bruto (PDB) riil, tingkat inflasi, nilai tukar dan pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak Indonesia selama tahun 1976-2013, dengan memanfaatkan Error Correction Model (ECM). Temuan studi menunjukkan bahwa dalam jangka panjang; GDP riil, nilai tukar, dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi penerimaan pajak Indonesia, kecuali tingkat inflasi. Dalam jangka pendek, penerimaan pajak Indonesia secara statistik dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, sedangkan variabel lainnya tidak mempengaruhi penerimaan pajak Indonesia. Koefisien Error Correction Term (ECT) sebesar 0,221, menjelaskan ketidaksesuaian penerimaan pajak yang terjadi dalam jangka panjang terkoreksi sebesar 22 persen dalam satu periode.

Klasifikasi JEL: E01, E20, H20

Kata kunci: Model Koreksi Kesalahan, Ekonomi Makro, Penerimaan Pajak

1. PERKENALAN

Sebagai salah satu tugas, Pemerintah bekerja untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat di negaranya melalui pembangunan ekonomi. Untuk menjalankan peran tersebut, Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai semua kegiatan. Pendanaan tersebut berasal dari penerimaan negara yang bersumber dari berbagai sumber, seperti; pajak, pinjaman, bantuan dari tingkat pemerintahan lain, biaya administrasi, pelayanan, serta pendapatan bisnis (Poole, 1956).

Secara umum penerimaan negara berasal dari dua sumber yaitu pertama, penerimaan pajak dari iuran wajib yang dipotong sehubungan dengan kegiatan tertentu (Hyman, 2011). Kedua, PNBP, yang diperoleh selain dari penerimaan perpajakan, seperti penerimaan dari sumber daya alam, penerimaan dari laba perusahaan atau badan usaha milik negara, dan penerimaan bukan pajak lainnya.

Di beberapa negara barat seperti Spanyol, Hungaria, Italia, Inggris, negara-negara Uni Eropa, dan Amerika Serikat, mayoritas penerimaan pemerintah berasal dari penerimaan pajak yang mencapai lebih dari 50 persen dari total penerimaan negara. Di negara-negara Asia seperti Jepang, Thailand, China, India, termasuk Indonesia, penerimaan pemerintah terbesar juga berasal dari pajak.

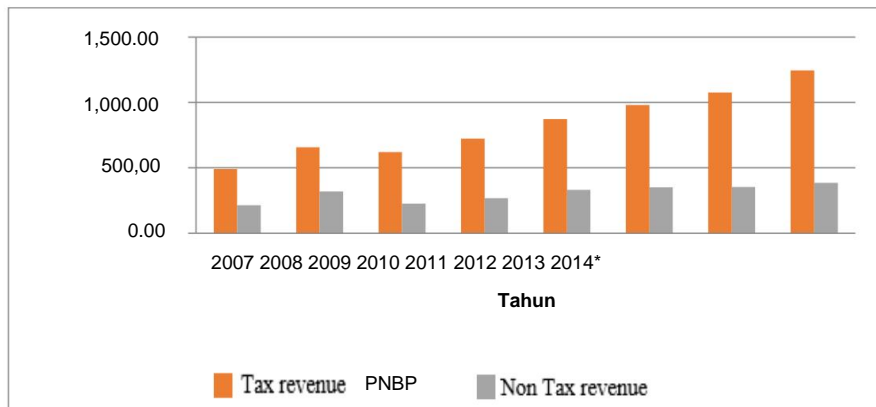
Pendapatan Pemerintah Indonesia selama bertahun-tahun didominasi oleh pajak. Gambar 1 menunjukkan bahwa kontribusi pajak yang tinggi dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak selama delapan tahun terakhir. Pada tahun 2007, pajak menyumbang sekitar 70 persen dari pendapatan dalam negeri. Peran pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri meningkat setiap tahunnya dan mencapai 76 persen dari total penerimaan pada tahun 2014.

* Penulis yang sesuai. *Alamat email:* amalwijayanti@gmail.com

Analisis Penerimaan Pajak Indonesia

Pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar ditunjukkan pada Gambar 2. Selama tujuh tahun terakhir, tren proporsi rata-rata penerimaan pajak terus meningkat dan mencapai 65 persen dalam pembiayaan belanja negara, sedangkan sisanya didanai dari bukan pajak, pendapatan, hibah, dan pinjaman.

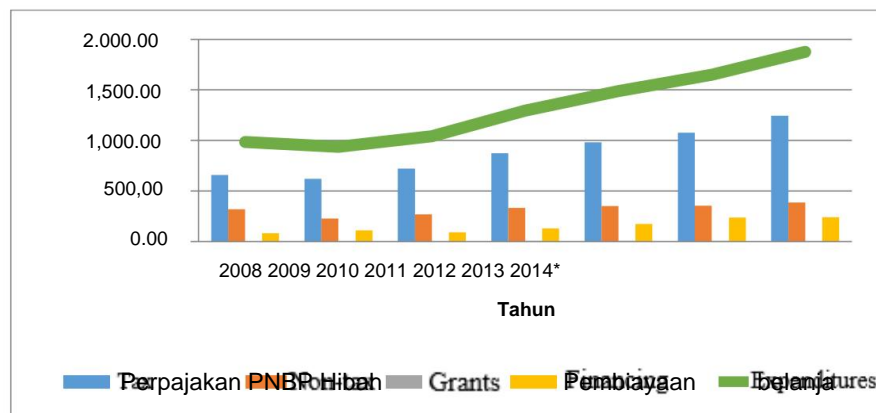
Terkait dengan perannya sebagai sumber utama penerimaan dan pengeluaran Pemerintah, penerimaan pajak juga memiliki risiko terkait dengan target pajak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Selama lima tahun terakhir, penerimaan pajak menunjukkan kondisi shortfall. Pada tahun 2009, selisih antara realisasi dan target pajak sebesar Rp 32.032,60 miliar dan jumlah tersebut meningkat hingga tahun 2013 menjadi Rp 76.246 miliar. Permasalahan tersebut berimplikasi pada pentingnya penyusunan model kebijakan penerimaan pajak.



Catatan: *APBN-P (koreksi anggaran Pemerintah Indonesia)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2014 (diolah)

Gambar 1 Perkembangan PNBPN dan PNBPN Indonesia 2007-2014



Sumber: Kementerian Keuangan, 2014 (diolah)

Gambar 2 Perkembangan Sumber Pendanaan dan Belanja Pemerintah Indonesia Tahun 2008-2014

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, dikembangkan model pajak dengan melibatkan faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi penerimaan pajak. Faktor-faktor ini mungkin termasuk tradisi

elemen dasar pajak atau biasa disebut tax handles, seperti model yang dikembangkan oleh Ahmed (1994) dan Ghura (1998). Selain itu, model pajak juga mempertimbangkan faktor ekonomi makro, seperti; pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dan pengeluaran pemerintah.

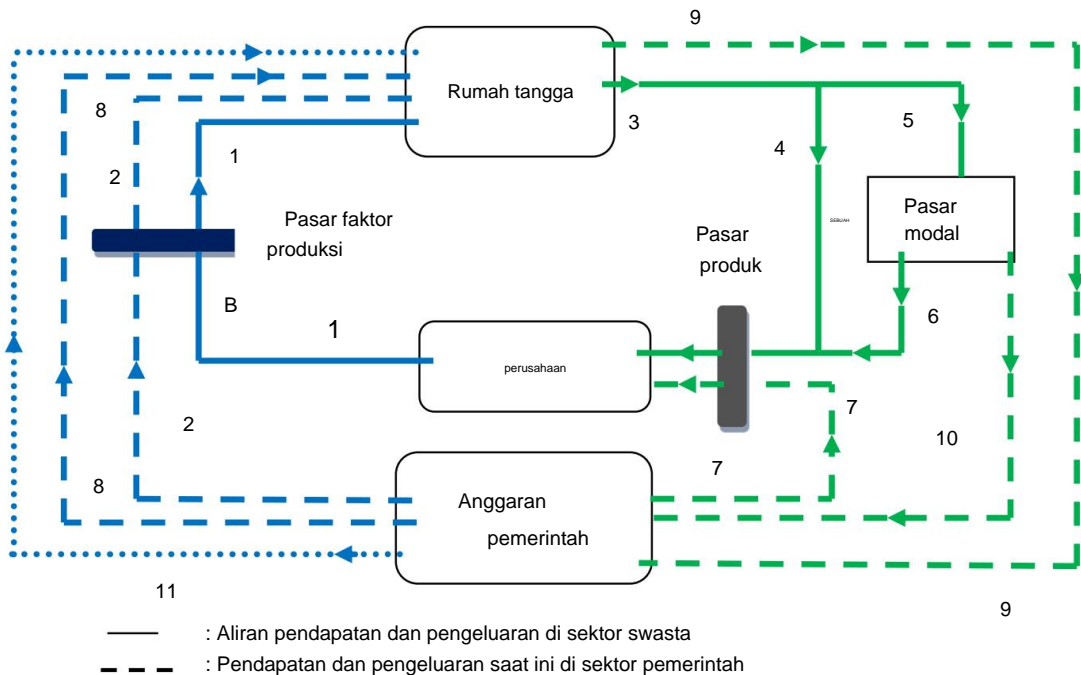
Fokus penelitian ini adalah menganalisis pengaruh indikator makroekonomi terhadap penerimaan pajak, dan dengan menggunakan pendekatan kointegrasi dan error correction model (ECM) diamati bagaimana dinamika pengaruh variabel makroekonomi terhadap penerimaan pajak. Variabel makroekonomi yang diperkirakan mempengaruhi pajak antara lain produk domestik bruto (PDB), tingkat inflasi, nilai tukar terhadap USD, dan anggaran negara.

2. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori ekonomi publik menjelaskan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam perekonomian. Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam perekonomian suatu negara, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitas. Due (1963) menambahkan satu lagi fungsi pemerintah, yaitu fungsi komersial yang menjelaskan bahwa barang atau jasa akan lebih efisien jika diproduksi atau disediakan oleh pemerintah.

Sebagai penyelenggara negara, pemerintah berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan. Pemerintah juga bertugas menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh pasar. Peran pemerintah dalam perekonomian dapat dijelaskan dengan aliran melingkar pendapatan dan pengeluaran seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3 (Musgrave dan Musgrave, 1989). Jika perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor swasta (perusahaan) dan rumah tangga, aliran dana dalam perekonomian dapat digambarkan sebagai berikut: Sektor rumah tangga akan memperoleh pendapatan melalui penjualan faktor-faktor produksi di pasar faktor (garis 1). Pendapatan yang diperoleh kemudian digunakan untuk konsumsi (baris 4) dan/atau disimpan (baris 5). Jika ada sebagian pendapatan yang ditabung, maka tabungan tersebut membiayai belanja modal (baris 6). Lini 4 dan lini 6 merupakan kombinasi dari pembelian produk di pasar suatu produk yang akan mendorong pendapatannya akan digunakan untuk membeli faktor-faktor produksi.

Karena dalam perekonomian ditambahkan peran sektor publik (pemerintah), maka faktor-faktor produksi tidak hanya dibeli oleh sektor swasta, tetapi juga oleh sektor pemerintah (baris 2). Pemerintah juga membeli output yang dihasilkan oleh sektor swasta (baris 7). Selain membeli faktor-faktor produksi dan output, pemerintah juga memberikan tunjangan (baris 8). Selanjutnya untuk pembelian dan pembayaran tunjangan, pemerintah membutuhkan penerimaan dari pajak (baris 9) dan pinjaman (baris 10).



Gambar 3 Aliran Dana Sektor Publik dalam Perekonomian
 Sumber: diadaptasi dari Musgrave dan Musgrave (1989)

Dalam penyediaan barang dan jasa tersebut, Pemerintah memerlukan sumber pendanaan yang berasal dari penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dan potensial, dan untuk meningkatkan penerimaan tersebut, pemerintah perlu menyusun kebijakan perpajakan yang sesuai dengan kondisi perekonomian.

Faktor ekonomi makro berpengaruh positif atau negatif terhadap penerimaan pajak. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, pengeluaran negara, dan overvaluasi nilai tukar domestik terhadap USD (dengan asumsi bahwa neraca pembayaran surplus) akan meningkatkan nilai riil objek pajak. Kenaikan nilai riil basis pajak berimplikasi pada kenaikan pajak yang dipungut, dan sebaliknya. Berbeda dengan ketiga faktor tersebut, kenaikan inflasi dapat meningkatkan atau menurunkan penerimaan pajak. Kenaikan inflasi dapat meningkatkan penerimaan pajak jika pajak tersebut dibebankan dalam bentuk ad valorem. Kenaikan inflasi juga dapat mengurangi penerimaan pajak jika pajak dibebankan dalam bentuk tertentu (Tanzi, 1989).

Beberapa studi empiris yang menyelidiki hubungan faktor makroekonomi dan penerimaan pajak telah dilakukan oleh para peneliti di berbagai negara. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muibi dan Sinbo (2013). Mereka mengamati pengaruh faktor ekonomi makro terhadap penerimaan pajak di Nigeria. Dengan menggunakan error correction model (ECM), mereka menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak Nigeria sedangkan depresiasi nilai tukar dan tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Dalam jangka pendek, variabel seperti PDB,

Penelitian empiris menggunakan Indonesia sebagai studi kasus dilakukan oleh Sinaga (2010). Sinaga memperkirakan pengaruh variabel makroekonomi terhadap penerimaan pajak, dan penerimaan dari bentuk pajak lainnya, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan. Analisis OLS menunjukkan bahwa total penerimaan pajak dan penerimaan pajak pertambahan nilai dipengaruhi oleh PDB, nilai tukar Rupiah (IDR) terhadap dolar Amerika Serikat (USD), nilai impor, dan inflasi. Penerimaan pajak penghasilan disebabkan oleh PDB, kurs IDR ke USD, kurs Sertifikat Bank Indonesia (SBI); sedangkan pajak bumi dan bangunan, dan pajak bumi dan bangunan disebabkan oleh PDB, nilai tukar Rupiah terhadap USD, dan harga minyak mentah.

1. PDB riil mungkin secara positif mempengaruhi penerimaan pajak
2. Inflasi secara negatif dapat mempengaruhi penerimaan pajak
3. Nilai tukar Rupiah yang terlalu tinggi terhadap USD dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak; sebaliknya nilai tukar Rupiah terhadap USD berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak (asumsi: jika neraca pembayaran dalam kondisi surplus);
4. Pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi penerimaan pajak secara positif.

Penelitian ini diestimasi dengan *Error Correction Model* (ECM) untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap penerimaan pajak di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek. ECM merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengakomodasi lag dalam model. ECM juga digunakan untuk menunjuk hubungan ketidakseimbangan atau hubungan jangka pendek dari satu model (Thomas, 1997). Estimasi ECM dijalankan dengan menggunakan *prosedur dua tahap Engle-Granger*. Pertama, estimasi parameter jangka panjang dan uji kointegrasi dilakukan. Setelah itu dilakukan estimasi parameter jangka pendek. Estimasi model jangka panjang dapat didefinisikan sebagai berikut:

Dimana, adalah PDB riil, adalah inflasi, adalah pengeluaran, dan adalah nilai tukar IDR terhadap USD. Menurut model setoran berikut: model jangka pendek dapat

Penerimaan pajak merupakan penerimaan pemerintah yang diperoleh dari iuran wajib warga negara kepada pemerintah menurut undang-undang. Data penerimaan pajak adalah akumulasi pajak pemerintah pusat selama satu tahun pajak, yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan barang mewah, pajak perdagangan internasional, dan sebagainya—dihitung dalam miliar rupiah. PDB mencerminkan pendapatan nasional Indonesia. Variabel ini juga menggambarkan nilai tambah total dari setiap unit bisnis di suatu negara—artinya penjumlahan dari keseluruhan nilai akhir dari

barang dan jasa yang diproduksi dalam satu unit perekonomian. Untuk memperluas studi ini, digunakan PDB riil (tahun dasar=2005) dalam triliun rupiah.

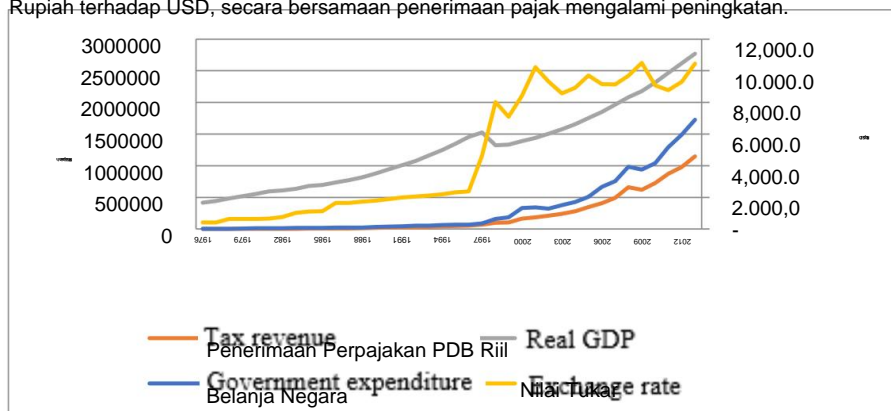
Inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan umum harga barang dan jasa; yang merupakan kebutuhan pokok warganya. Data inflasi dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar=2000). Kurs merupakan harga mata uang asing yang dikutip oleh mata uang domestik yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter Indonesia. Penelitian ini menggunakan rupiah sebagai mata uang domestik dan dolar AS sebagai mata uang asing. Pengeluaran pemerintah menunjukkan total pengeluaran satu negara dalam satu tahun fiskal yang mengalihkan ekuitas saat ini dan merupakan pengeluaran wajib pemerintah. Total belanja merupakan penjumlahan dari belanja pemerintah pusat dan pembayaran transfer (dalam miliar rupiah).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari instansi terkait. Data tersebut dihimpun dalam time-series tahunan—mulai tahun 1976 hingga 2013. Data total penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah dikumpulkan dari APBN yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data PDB riil dan inflasi dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik; sedangkan nilai tukar IDR ke USD dikumpulkan dari Bank Indonesia.

4. DISKUSI

4.1 Perkembangan Terbaru Variabel

Selama periode penelitian, penerimaan pajak cenderung memiliki tren yang searah dengan variabel makroekonomi yaitu PDB riil, nilai tukar Rupiah terhadap USD, dan pengeluaran pemerintah. Gambar 3 menunjukkan bahwa ketika PDB riil naik dan begitu pula nilai tukar Rupiah terhadap USD, secara bersamaan penerimaan pajak mengalami peningkatan.



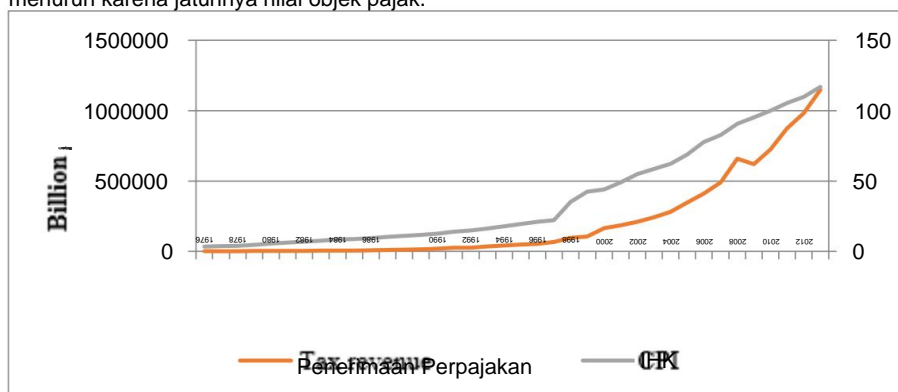
Gambar 4 Tren Penerimaan Pajak, Belanja Pemerintah, Kurs Rupiah

kurs terhadap USD, dan PDB Riil Indonesia (1976-2013)
Sumber: Kementerian Keuangan (2014); BPS (2014); dan BI (2014), diproses

Menurut Gambar tahun 1998, penurunan PDB riil tidak diikuti dengan penurunan penerimaan pajak. Pada tahun yang dimaksudkan, PDB riil menurun karena krisis moneter. Pajak yang dipungut mencapai kenaikan yang luar biasa terhitung sebesar 43,7 persen. Perubahan yang tidak sinkron antara PDB riil dan penerimaan pajak ini disebabkan mengikuti dampak reformasi perpajakan di tahun sebelumnya. Pemberlakuan reformasi muncul dalam bentuk empat undang-undang perpajakan yang merupakan dewan sengketa pajak.

Aspek lain dari tren penerimaan pajak di Indonesia dapat diamati pada tahun 2010. Pada tahun berjalan, penguatan rupiah tidak diikuti oleh penurunan penerimaan pajak. Pada 2010, penerimaan pajak meningkat 16,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut merupakan imbas dari melonjaknya jumlah wajib pajak seiring dengan diberlakukannya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak pada tahun 2010.

Selain ketiga variabel makroekonomi, tren penerimaan pajak juga cenderung berbarengan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK)—yang menggambarkan inflasi. Kenaikan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4. Kenaikan IHK menyebabkan proporsi pajak yang dipungut; karenanya, penerimaan pajak meningkat. Di sisi lain, CPI yang terlalu tinggi menunjukkan tingkat inflasi yang tinggi; demikian, penerimaan mungkin menurun karena jatuhnya nilai objek pajak.



Gambar 5 Tren Penerimaan Pajak dan Indeks Harga Konsumen (1976-2013)

Sumber: Kementerian Keuangan (2014), dan Bank Dunia (2014), diolah

4.2 Hasil Estimasi dan Analisis

Tabel 1 menunjukkan ringkasan hasil estimasi model penerimaan pajak jangka panjang. Sesuai dengan hipotesis, variabel PDB riil, nilai tukar Rupiah terhadap USD, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PDB riil, belanja negara dan depresiasi nilai tukar akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak Indonesia. Berbeda dengan ketiga variabel tersebut, variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Dengan meningkatnya inflasi, penerimaan pajak Indonesia menurun. Korelasi terbalik ini disebabkan oleh tingginya tingkat inflasi yang menunjukkan kerentanan perekonomian suatu negara yang dapat menyebabkan kegiatan ekonomi jatuh, maka pungutan pajak akan otomatis berkurang dan penerimaan pajak juga akan menurun.

Seperti terlihat pada Tabel 1, variabel PDB riil, nilai tukar Rupiah terhadap USD, dan pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Indonesia sedangkan variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Pengaruh inflasi yang tidak signifikan terhadap penerimaan pajak terjadi karena selama periode penelitian, perubahan tingkat inflasi tidak selalu disertai dengan perubahan penerimaan pajak. Peningkatan inflasi Indonesia tidak selalu diikuti dengan penurunan penerimaan pajak Indonesia, seperti yang terjadi pada tahun 1983, 1985, 1997, dan 1998. Dalam kurun waktu tersebut laju inflasi dan penerimaan pajak mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan oleh reformasi perpajakan pemerintah pada tahun 1983, 1985, 1997, dan 1998—menghasilkan peningkatan

Penerimaan pajak Indonesia, meskipun kondisi ekonomi jatuh karena tingkat inflasi yang tinggi.

Tabel 1 Hasil Estimasi Penerimaan Pajak Jangka Panjang

Variabel	Koefisien (status-t)
Konstan	-19,220 (-7.302)***
PDB	1,529 (7.003)***
informasi	-0,0006 (-0,575)
ER	0,329 (3.805)***
Sp	0,525 (5.995)***
R-kuadrat	0,9962
Adj. R-kuadrat	0,9957
F-stat	2.153.715
Durbin Watson	0,688

*** Signifikan pada alfa 1 persen

** Signifikan pada alpha 5 persen

* Signifikan pada alpha 10 persen

Sumber: Hasil data yang diolah oleh EViews 8.0

Dalam jangka panjang, variabel PDB, nilai tukar Rupiah terhadap USD, dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi penerimaan pajak melalui basis pajak. Peningkatan nilai PDB juga menunjukkan perbaikan sektor ekonomi. Beberapa sektor ekonomi juga dimanfaatkan sebagai objek pajak, sehingga apabila PDB meningkat maka kondisi sektor ekonomi tersebut juga akan meningkat serta nilai riil objek pajak. Kenaikan nilai objek pajak akan menaikkan jumlah pajak yang dipungut sehingga penerimaan pajak juga akan meningkat. Selain itu, pengaruh PDB terhadap penerimaan pajak juga dapat terjadi melalui perubahan pendapatan dan pola konsumsi individu. Peningkatan PDB akan cenderung meningkatkan pendapatan individu dan mendorong konsumen untuk mengkonsumsi lebih banyak barang dan jasa. Hal ini dapat menaikkan jumlah pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, dan sebaliknya jika nilai PDB riil menurun.

Perubahan variabel nilai tukar Rupiah terhadap USD akan mempengaruhi penerimaan pajak melalui perubahan volume dan nilai ekspor dan impor produk tersebut. Penguatan Rupiah terhadap USD dapat mendorong harga ekspor muncul lebih tinggi di pasar luar negeri. Hal tersebut berimplikasi pada penurunan permintaan barang domestik di pasar internasional sehingga volume ekspor akan menurun. Penurunan volume ekspor akan berimplikasi pada pengurangan pajak ekspor yang akan ditarik sehingga penerimaan pajak juga akan menurun. Selain itu, penguatan rupiah terhadap USD dapat mendorong harga impor tampak

menjadi lebih rendah di pasar domestik. Rendahnya harga tersebut akan mendorong permintaan terhadap produk impor. Peningkatan permintaan produk impor mendorong peningkatan volume impor, sehingga pajak impor juga akan meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan neraca pembayaran surplus (ekspor lebih besar dari impor)

Indonesia, penguatan nilai tukar Rupiah terhadap USD berimplikasi pada penurunan penerimaan pajak Indonesia, begitu pula sebaliknya.

Karena pengaruh PDB dan nilai tukar Rupiah terhadap USD adalah positif, maka variabel pengeluaran pemerintah juga berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak jangka panjang. Pengaruh positif pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak Indonesia terjadi karena sejumlah pengeluaran pemerintah juga merupakan objek perpajakan, seperti belanja pegawai. Jika belanja pegawai meningkat, maka pendapatan PNS juga akan meningkat. Peningkatan pendapatan akan berimplikasi pada peningkatan objek penerimaan pajak sehingga penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan pajak juga akan meningkat.

Setelah model estimasi jangka panjang, dilakukan uji kointegrasi untuk memastikan keseimbangan jangka panjang dalam model penerimaan pajak yang dikembangkan. Dalam penelitian ini, uji kointegrasi dilakukan dengan menggunakan uji Engle-Granger. Pada uji Engle-Granger didapatkan hasil nilai t hitung sebesar -3,650 yang lebih besar dari nilai t -kritik (-2.943). Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel saling terkointegrasi.

Selanjutnya, model estimasi penerimaan pajak Indonesia jangka pendek adalah diuji. Tabel 2 menunjukkan ringkasan hasil estimasi model penerimaan pajak jangka pendek Indonesia. Pada Tabel 2 terlihat bahwa secara parsial hanya variabel pengeluaran pemerintah yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan ketiga variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Indonesia. Pengaruh yang tidak signifikan dari ketiga variabel tersebut terjadi karena penerimaan pajak dalam jangka pendek lebih cenderung dipengaruhi oleh tarif dan dasar pengenaan pajak sebagaimana diatur dalam konstitusi. Hal ini dikarenakan model variabel makroekonomi dan penerimaan pajak merupakan model jangka panjang dimana penerimaan pajak tidak dapat secara langsung menyesuaikan dengan perubahan PDB, inflasi, dan nilai tukar Rupiah terhadap USD. Penerimaan pajak membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi.

Berbeda dengan ketiga variabel lainnya, pengeluaran pemerintah jangka pendek berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Pengaruh positif dan signifikan anggaran negara terhadap penerimaan pajak terjadi karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perubahan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan perubahan nilai riil atas dasar perpajakan dan juga akan mempengaruhi penerimaan pajak. Perubahan belanja pemerintah secara otomatis akan mengubah nilai dasar pengenaan pajak tanpa memerlukan lag. Misalnya, perubahan belanja pegawai menyebabkan nilai dasar pengenaan pajak berubah sehingga penerimaan pajak juga akan berubah secara otomatis.

Tabel 2 Hasil Estimasi Penerimaan Pajak Jangka Pendek

Variabel	Koefisien
	(status-t)
Konstanta	0,121 (3.908)***
PDB	0,164 (0.580)

Variabel	Koefisien
informasi	0,001 (1.446)
ER	0,029 (0,353)
Sp	0,327 (3,481)***
U(-1)	-0,206 (-1,983)*
R-kuadrat	0,482
Adj. R-kuadrat	0,398
F-stat	5.765

*** Signifikan pada alpha 1 persen

** Signifikan pada alpha 5 persen

* Signifikan pada alpha 10 persen

Sumber: Hasil data yang diolah oleh EvIEWS 8.0

Hasil estimasi jangka pendek menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak jangka pendek. Pada model jangka pendek ini, hasil estimasi menunjukkan bahwa error correction term (ECT) bertanda negatif dan signifikan. Koefisien ECT sebesar 0,206 menunjukkan bahwa ketidaksesuaian penerimaan pajak Indonesia yang terjadi dalam jangka panjang dan jangka pendek akan terkoreksi sebesar 20,6 persen.

5. RINGKASAN

5.1 Kesimpulan

Hasil estimasi jangka panjang sesuai dengan hipotesis yang menunjukkan bahwa variabel PDB, nilai tukar rupiah terhadap USD, dan belanja negara berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. PDB, nilai tukar rupiah terhadap USD, serta pengeluaran tidak mempengaruhi penerimaan pajak, melainkan melalui basis pajak. Perubahan nilai PDB, nilai tukar, dan belanja negara, menyebabkan perubahan volume dan atau nilai riil basis pajak. Berbeda dengan ketiga variabel lainnya, secara statistik tingkat inflasi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak dalam jangka panjang.

Dalam jangka pendek, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, tetapi pengeluaran negara, PDB, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap USD secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Penerimaan pajak tidak dapat secara langsung dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyesuaikan perubahan besaran ketiga variabel tersebut.

5.2 Implikasi Hasil

penelitian memperkuat secara empiris bahwa dalam pelaksanaan kebijakan fiskal khususnya dalam hal penerimaan pajak, pemerintah juga selalu menjaga kondisi makroekonomi khususnya dalam stabilisasi pertumbuhan ekonomi. Dari estimasi elastisitas, diketahui bahwa nilai PDB memiliki pengaruh paling besar

pada penerimaan pajak dibandingkan dengan variabel lainnya. Kebijakan tersebut, terutama kebijakan untuk merangsang tabungan untuk memperkuat akumulasi modal penentu pertumbuhan ekonomi.

Perumusan kebijakan fiskal dari sisi pengeluaran harus tepat dilakukan karena berimplikasi pada perekonomian dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dengan mengalokasikan pengeluaran yang berkualitas seperti pembangunan infrastruktur yang dapat berdampak dalam jangka panjang, dan belanja pegawai pemerintah yang dapat berdampak dalam jangka pendek pada sisi permintaan dan dorongan penerimaan pajak.

Referensi

- Ahmad, QM (1994). *Determinan Tax Buoyancy: Sebuah Pengalaman dari Negara Berkembang. Kajian Pembangunan Pakistan*, 1089-1098.
- Biro Anggaran. (2011). *Anggaran Thailand Singkat Tahun Anggaran 2011*. Biro Anggaran Thailand.
- Departemen Perekonomian. (2013). *Statistik Keuangan Publik India 2012-2013*. New Delhi: Menteri Keuangan India.
- Direktorat Penyusunan APBN. (2014). *Dasar-dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia* (Edisi Ke-2). Jakarta: Kementerian Keuangan Indonesia.
- Karena, JF (1963). *Keuangan Pemerintah Sebuah Analisis Ekonomi* (3rd ed). Kayu rumah: Richard D. Irwin, Inc.
- Ghura, D. (1998). Pendapatan Pajak di Afrika Sub-Sahara: Pengaruh Kebijakan Ekonomi dan Korupsi. *Kertas Kerja Dana Moneter Internasional*.
- Gujarati, DN, & Fajar CP (2009). *Ekonometrika Dasar* (edisi ke-5). New York: McGraw-Hill.
- Hyman, DN (2011). *Keuangan Publik: Aplikasi Teori Kontemporer untuk Kebijakan* (Edisi ke-10). Mason: Pembelajaran Cengage Barat Daya.
- Karran, T. (1985). Determinan Perpajakan di Inggris: Sebuah Uji Empiris. *Jurnal Publik* 5(3), di <http://www.jstor.org/stable/2998444>. [Diakses tanggal 28 Maret 2015]. Tersedia 365-386.
- Miyasto. (1997). *Sistem Pajak Nasional Dalam Era Ekonomi Global*. Disampaikan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 6 Desember 1999. Tersedia di eprints.undip.ac.id/262/1/Miyasto.pdf. [Diakses pada 28 Maret 2015].
- Muibi, SO, & Olatunbosun, OS (2013). Determinan Makroekonomi Penerimaan Pajak di Nigeria (1970-2011). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Terapan Dunia*, 28(1), 27-35. 10.5829/idosi.wasj.2013.28.01.1189. [Diakses tanggal 28 Maret 2015].
- Musgrave, RA, & Peggy BM (1989). *Keuangan Publik dalam Teori dan Praktek* (edisi ke-5). New York: McGraw-Hill.
- Parkin, M. (2008). *Ekonomi* (edisi ke-8). Boston: Pearson Addison Wesley.
- Poole, KE (1956). *Keuangan Publik dan Kesejahteraan Ekonomi* (edisi ke-3). New York: Rinehart & Company, Inc.
- erban, C., & Ioan, T. (2010). Pendapatan Pemerintah Umum Di Negara-Negara Uni Eropa Tertentu. *Sejarah Universitas Petrojani, Ekonomi*, 10(2), 307-314.

- Sinaga, AR (2010). *Pengaruh Variabel-variabel Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia*. [Tesis]. Depok:Universitas Indonesia.
- Tanzi, V. (1989). "Dampak Kebijakan Makroekonomi terhadap Tingkat Perpajakan dan Perimbangan Keuangan di Negara Berkembang. Makalah Staf – *Dana Internasional*, 36(3), 361-373. Tersedia di www.aporc.org/LNOR/8/ISORA2008F31.pdf. [Diakses pada 1 April 2015].
- Thomas, RL (1997). *Ekonometrika Modern Sebuah Pengantar*. Harlow: Addison Wesley Longman.
- Zhang, M., & Jin-Chuan, C. (2008). Analisis Kointegrasi Hubungan antara Penerimaan Pajak dan Faktor Makroekonomi di Cina. Prosiding *Simposium Internasional ke-7 tentang Riset Operasi dan Penerapannya* (ISORA '08), Lijiang, Tiongkok, 31 Oktober-3 November. Hal 260-265. Tersedia di www.aporc.org/LNOR/8/ISORA2008F31.pdf. [Diakses pada 1 April 2015].